

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aisyah, Rr Herini Siti, *Buku Ajar Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, United States Co, 1968.
- Budiarjo, M. Mirriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Djatmiati, Tatiek Sri, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.
- , *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Hadjon, Philipus M, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya, 1992.
- , *Fungsi Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
- Hartini, Sri, Kadarsih, Setiajeng dan Sudrajat, Tedi, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ilmar, Amiruddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.
- Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Ahmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

Sartika, Dewi, *Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara*, PKP2A III LAN Samarinda, Samarinda, 2016.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Sirajuddin, Sukriono, Didik dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2011.

Utrecht, E dan Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.

Widjaja, A.W, *Administrasi Kepegawaian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

———, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Jurnal

Faturrohman, Irwan, “PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP MELALUI METODE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN”, *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 11, Nomor 21, Maret 2017.

Febriana, Deri, “Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Aparatur dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, Volume VI, Nomor 1, Januari-Juni 2014.

Santoyo, “Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September 2008.

Internet

Bidang Informasi Publik, “Pentingnya Revolusi Mental Bagi ASN”, <https://malangkota.go.id/2016/11/15/pentingnya-revolusi-mental-bagi-asn/>, diakses tanggal 26 Maret 2019.

Yozami, M. Agus, “3 Kompetensi Kunci yang Wajib Dimiliki ASN Para CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM diharap dapat menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a65dc3a5d880/3-kompetensi-kunci-yang-wajib-dimiliki-asn/>, diakses tanggal 26 Maret 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).